

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum atau lebih sering disingkat Pemilu merupakan salah satu sarana penyaluran hak dasar bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan wilayah politik. Pemilu dijadikan sebagai sebuah indikator dari keberhasilan demokrasi pada suatu Negara. Pemilu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan sendiri siapa yang menjadi wakil bagi masyarakat yang dapat melindungi hak-hak masyarakat tersebut.

Pemilihan umum secara langsung dilakukan pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1955. Sistem Pemilu di Indonesia sendiri dilakukan setiap 5 tahun sekali dalam memilih Presiden, DPR, DPRD, DPD, Gubernur, Bupati secara demokratis. Pembentukan KPU atau Komisi Pemilihan Umum yaitu sebagai suatu lembaga dalam penyelenggaraan pemilihan umum. KPU berdiri secara independen sehingga KPU tidak terpengaruh oleh lembaga lainnya dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam mengawasi demokrasi bangsa.

Melihat dari sistem politik yang demokrasi di Indonesia, rakyat memiliki hak untuk memilih wakil mereka yang duduk di parlemen untuk mewakili hak suara mereka. Salah satu indikator yang penting dalam negara yang demokratis adalah pemilu yang dilaksanakan tanpa *money politic* dalam bentuk pemilih yang rasional. Partisipasi politik merupakan aspek penting

dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur, dimana setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih secara menggunakan hak nya sesuai dengan kehendak individu tersebut.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu tentunya memiliki harapan besar bagi masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam agenda demokrasi 5 tahunan ini. Ditengah panasnya dunia politik saat ini, KPU menginginkan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan tidak Golput. Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang besar bagi perkembangan politik 5 tahun kedepan.

Pada pemilihan umum yang diselenggarakan pada 17 April 2019, dilaksanakan pemilihan legislatif secara serentak untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum RI sudah melakukan persiapan yang cukup matang terkait dengan diadakannya pemilihan legislatif serentak pada tahun 2019. Persiapan yang dilakukan tidak hanya di pada persiapan material seperti kotak suara, surat suara dan peralatan lain tetapi juga sistem pemilihan dan tata cara pemilihan yang telah dipersiapkan dengan baik oleh KPU pusat.

KPU Kabupaten Bangka dalam hal ini sebagai salah satu bagian yang bertanggung jawab untuk mensukseskan pemilu di Kabupaten Bangka sudah

melakukan persiapan yang cukup banyak dengan berbagai kegiatan dalam menyambut Pemilu Legislatif 2019. Berbagai kegiatan yang dilakukan tentunya bertujuan untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat untuk ikut serta dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali.

Tingkat partisipasi politik di Kabupaten Bangka cenderung rendah jika di bandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut data dari KPU secara resmi, kecamatan Sungailiat jumlah pemilih 12.728 dengan 59,68% partisipasi masyarakat, kecamatan Mendo Barat desa Petaling jumlah pemilih 2.096 dengan 60,97% partisipasi masyarakat, kecamatan Puding Besar jumlah pemilih 3.617 dengan 76,69% partisipasi masyarakat, kecamatan Merawang jumlah pemilih pemilih 1.420 dengan 48,10% partisipasi masyarakat, kecamatan Pemali jumlah pemilih 3.348 dengan 62,78% partisipasi masyarakat, kecamatan Bakam jumlah pemilih 1.296 dengan 78,09% partisipasi masyarakat, kecamatan Belinyu jumlah pemilih 3.270 dengan 59,79% partisipasi masyarakat, kecamatan Riau Silip jumlah pemilih 2.262 dengan 63,48% partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2018 hanya ada 63,56% masyarakat Bangka dari total 201.739 orang pemilu yang ikut berpartisipasi dalam pemilu(infopemilu.KPU.go.id). Pada pemilu tahun 2019, KPU Kabupaten mulai memperbaiki beberapa program mereka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dari latar belakang diatas maka peneliti ingin melihat apa saja upaya KPU Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Bangka tahun 2019 dan upaya apa yang dilakukan KPU untuk menjaga hak pilih masyarakat

Kabupaten Bangka dalam Pemilu tahun 2019. Upaya itu diterapkan dengan mempertimbangkan tiga nilai yang melandasi visi KPU , yakni kemandirian , profesionalitas , dan integritas .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, kemudian didapatkan rumusan masalah, yakni: Bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan bertujuan untuk : Melihat apa saja upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif serentak tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pembelajaran tentang ilmu sosiologi khususnya sosiologi politik dalam menjelaskan terkait demokrasi dan pemilu.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wacana dalam meningkatkan tingkat demokrasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rujukan kepada pihak KPU maupun pemerintah terkait dengan upaya dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemilihan umum.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama berjudul Inovasi Pelayanan Rumah Joglo Pemilu Pada KPU Provinsi Jawa Tengah yang ditulis oleh Abid Irfan Nuhaa, Dra. Dra.Dyah Hariani, M.M (2017). Penelitian ini bertujuan menganalisis Karakteristik Inovasi Rumah Joglo Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Menganalisis Faktor Pendorong dan Penghambat Inovasi Rumah Joglo Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian lebih menekankan pada suatu analisis dan sekaligus penggambaran tentang suatu kondisi realitas yang ada sehingga hasil dari penelitian tersebut adalah banyak menggunakan kata – kata deskriptif. Dengan demikian melalui penelitian deskriptif kualitatif ini hanya berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan Inovasi Pelayanan Rumah Joglo Pemilu pada KPU Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian milik oleh Abid Irfan Nuhaa, Dra. Dra.Dyah Hariani, M.M sangat membantu penelitian pada tahap untuk memulai melakukan penelitian, Karena penelitian oleh Abid Irfan Nuhaa, Dra. Dra.Dyah Hariani, M.M memiliki persamaan dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu sama – sama membahas inovasi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah jika oleh Abid Irfan Nuhaa, Dra. Dyah Hariani, M.M fokus mengkaji tentang sistem penyelenggaraan Pemilu dan mengetahui faktor – faktor penghambat KPU. Lokasi yang diteliti berada pada KPU Kabupaten Jawa Tengah. Sedangkan penelitian ini fokus kajian mengkaji Inovasi KPU Bangka dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Bangka.Lokasi yang diteliti adalah KPU Kabupten Bangka kecamatan Sungailiat.

Penelitian yang kedua berjudul Inovasi Pemutakhiran Data Pemilih Melalui Keterlibatan Mahasiswa (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015),yang ditulis oleh Ika Yulita Rumahorbo. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis inovasi pemutakhiran data pemilih melalui keterlibatan mahasiswa pada KPU Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015, mengidentifikasi dan menganalisis faktor – faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan inovasi pemutakhiran data pemilih KPU Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015 . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif. Tipe penelitian deskriptif menurut Moleong (2011) peneliti berupaya menggambarkan suatu fenomena

atau kejadian dengan apa adanya. Sementara pendekatan dalam penelitian oleh Ika Yulita Rumahorbo adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif menurut Moleong (2011) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain – lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian oleh Ika Yulita Rumahorbo adalah sama – sama meneliti tentang Inovasi KPU. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah jika penelitian Ika Yulita Rumahorbo fokus mengkaji pemutakhiran data pemilih. Yang berlokasi di Kota Bandar Lampung. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian tentang Inovasi KPU Bangka dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Bangka. Lokasi yang diteliti adalah KPU Kabupaten Bangka kecamatan Sungailiat.

F. Kerangka Teoretis

Penelitian ini menggunakan teori dari modal sosial milik Putnam. Untuk menganalisis Inovasi KPU Bangka Dalam Pelaksanaan Pemilu Kabupaten Bangka Tahun 2019. Modal sosial menurut Putnam adalah bagian dari kehidupan sosial, jaringan, norma dan kepercayaan yang mendorong *participants* bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu juga gagasan inti dari teori modal sosial adalah bahwa

jaringan sosial memiliki nilai kontak sosial mempengaruhi produktivitas individu dan kelompok. Artinya hubungan antar individu dan jaringan sosial dan norma resiprositas dan kepercayaan yang tumbuh dari hubungan-hubungan tersebut (Field, 2010:51). Putnam, yang latar belakangnya adalah ilmu politik, menyinggung Pieere Bourdieu dan ekonom Jerman Ekkehart Schlicht pada tahun 1980-an menekankan sumber daya sosial dan ekonom diwujudkan dalam jaringan sosial. Ia juga menyinggung James S Coleman yang meletakkan semua itu dalam konteks pendidikan. Modal sosial menurut para ahli dalam Hasbullah (2006:6-8), yaitu:

1. Modal Sosial menurut Cohen dan Prusak memberikan pengertian bahwa modal sosial sebagai stok dari hubungan yang aktif antar masyarakat.
2. Eva Cox mendefinisikan modal sosial sebagai suatu jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama.
3. Paul Bullen dan Jenny Onix memberi tambahan bobot terhadap dimensi modal sosial dengan mengatakan bahwa yang sangat penting dari modal sosial adalah kemampuannya sebagai basis sosial untuk membangun masyarakat sipil yang sebenarnya.
4. Adlem dan Kown yang menyatakan bahwa modal sosial merupakan gambaran dari keterkaitan internal yang mewarnai struktur kolektif

dan memberikan kohesifitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dan dinamika modal sosial yang terdapat dalam struktur.

5. Francis Fukuyama menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi.

Unsur pokok modal sosial menurut Hasbullah (2006: 9-16), yaitu :

1. Partisipasi dalam suatu jaringan

Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial yang akan kuat tergantung dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi membangun jaringan.

2. Hubungan timbal balik

Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri.

3. Rasa percaya (*Trust*)

Trust atau rasa percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan

melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung

4. Norma Sosial

Norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu etnisitas sosial tertentu.

5. Nilai-nilai

Nilai adalah sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Nilai merupakan asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang dianggap penting dalam masyarakat.

6. Tindakan yang proaktif

Salah satu unsur penting modal sosial adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat.

Menurut Putnam (Adhikari, 1996) bahwa modal sosial mengacu kepada ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kinerja agar saling menguntungkan. Dia melihat modal sosial sebagai bentuk barang publik yang berbeda dengan pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi dan politik pada level kolektif. Dia menekankan bahwa partisipasi orang-orang dalam kehidupan asosional menghasilkan institusi publik lebih efektif dan layanan lebih baik.

Selanjutnya Putnam dalam Field (2010: 52) memperkenalkan perbedaan antara 2 (dua) bentuk dasar modal sosial :

1. Menjembatani (Inklusif)

Modal sosial yang mengikat cenderung mendorong identitas eksklusif dan mempertahankan homogenitas, modal sosial yang menjembatani cenderung menyatukan orang dari beragam ranah sosial. Masing-masing bentuk tersebut membantu menyatukan kebutuhan yang berbeda.

2. Mengikat (Eksklusif)

Modal sosial yang mengikat adalah sesuatu yang baik untuk menopang resiprositas spesifik dan memobilisasi solidaritas. Selanjutnya, teori modal sosial yang dikemukakan Putnam menunjukkan kesamaan menonjol dengan pandangan Durkheim tentang solidaritas. Kemudian produktivitas dan secara efektif bahwa ia melihat modal sosial sebagai sesuatu yang fungsional, namun konteksnya menjelaskan bahwa ia tidak sedang menjelaskan aktor individu yang melakukan kalkulasi.

Modal sosial memiliki cakupan dimensi yang sangat luas dan kompleks. Para ahli memberikan pengertian tentang modal sosial sangat bervariasi, sesuai dengan sudut pandang serta dimensi yang dijadikan sebagai rujukan untuk memaknai modal sosial. Berbeda dengan modal manusia, yang lebih merujuk ke dimensi individu terkait dengan daya serta keahlian yang dimiliki seorang individu. Pada modal sosial lebih menekankan pada potensi individu

maupun kelompok dan hubungan antar kelompok dalam suatu jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota dan menjadi norma kelompok (Yuliarmi; 2011).

Bowling Alone sebagaimana dalam Putnam (Surjadi; 2009). Memformulasikan kapital sosial hanya ada dua unsur yaitu jaringan (*network*) dan norma. Kepercayaan dan norma timbal-balik (*norms of reciprocity*) adalah hasil atau akibat adanya jaringan dan norma. Putnam kemudian menambahkan definisi modal sosial dengan unsur *participants* (aktor atau anggota masyarakat spesifik yang terlibat di dalam tindakan bersama atau yang mendapatkan manfaat dari tindakan bersama).

Kemudian Putnam berpendapat kembali bahwa modal sosial merupakan sifat kehidupan sosial, jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan peserta (*participants*) bertindak bersama lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama.

Teori modal sosial milik Putnam digunakan untuk menganalisis bagaimana kaitannya modal sosial yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2019.